

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Kemiskinan yaitu satu di antara problem yang harus diperhatikan dalam setiap negara. Kemiskinan sering kali berkaitan dengan persoalan sosial yang kerap negara hadapi dalam melaksanakan program pembangunan yang telah ditentukan. Menurut Bonaraja Purba, Muhammad Fitri Rahmadana et al (2021) menyatakan pada dasarnya, ketimpangan pada distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat serta tingkat kemiskinan yang diperlihatkan dari banyaknya individu yang ada di bawah garis kemiskinan yakni dua permasalahan utama di berbagai negara berkembang, begitu halnya Indonesia. Di negara Indonesia, kemiskinan termasuk dalam permasalahan yang signifikan. Permasalah ini sangat kompleks serta sifatnya multidimensional, hal tersebut berkaitan dengan beragam aspek misalnya ekonomi, sosial, budaya atau semacamnya. Persoalan kemiskinan masih terus berlanjut jika program pembangunan tidak terlaksana secara efektif, utamanya pada negara-negara berkembang layaknya Indonesia.

Kemiskinan adalah isu yang dijumpai oleh beragam negara di dunia, terutama Indonesia yang masih termasuk negara berkembang. Semenjak Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan, pada periode 1945 – 1998 data mengenai angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan fluktuasi yang signifikan terutama selama krisis moneter tahun 1997-1998 angka kemiskinan mencapai 49,5 juta jiwa (24,2%) dari populasi penduduk Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2018). Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan untuk mengatasi kemiskinan, namun angka kemiskinan masih belum mengalami perubahan yang signifikan. Hingga sekarang

kemiskinan masih menjadi permasalahan yang belum dapat terselesaikan di Indonesia, pengentasan kemiskinan pun menjadi salah satu tujuan utama kebijakan di negara- negara berkembang (Chuong, 2011). Permasalahan dari kemiskinan ini jelas memerlukan perhatian yang lebih mendalam dari pihak pemerintah. Menurut Nafi'ah (2021) menyebutkan bahwa apabila tingginya angka kemiskinan mencerminkan banyaknya masyarakat yang belum mampu menjalani kehidupan dengan layak, berarti tingkat kesejahteraan masyarakat masih relatif rendah.

Kesejahteraan masyarakat berfungsi sebagai indikator penting untuk memprediksi tingkat kemiskinan suatu daerah. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah bisa dipergunakan untuk menjadi alat ukur dalam mengukur kapabilitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. kemiskinan merupakan menjadi topik utama yang harus dijelaskan secara mendalam dalam konteks pembangunan (Murdiansyah, 2014). Penentuan keberhasilan atau kegagalan proses pembangunan dapat ditentukan oleh perubahan tingkat kemiskinan di sebuah area tersebut. Kemiskinan bisa terjadi bila individu ataupun kelompok tidak cukup mampu dalam memenuhi suatu standar hidup tertentu serta tidak cukup mampu menggapai tingkat kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang harus dimiliki oleh mereka dalam pandangan lain, kemiskinan dimaknai sebagai ketidakmampuan individu dalam mencukupi kebutuhan primer layaknya pakaian, makanan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan serta kebutuhan lainnya. Pada segi ekonomi, kemiskinan dinilai sebagai ketidakmampuan seseorang dalam mendapatkan suatu mata pencaharian dengan layak guna menunjang kehidupannya. Hal tersebut dapat ditinjau dari rendahnya asupan gizi, rendahnya tingkat pendidikan, serta tidak layaknya pakaian yang

dikenakan dan lain sebagainya. Kemiskinan semakin memiliki makna yang luas, dimana semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator dan masalah-masalah yang terkait.

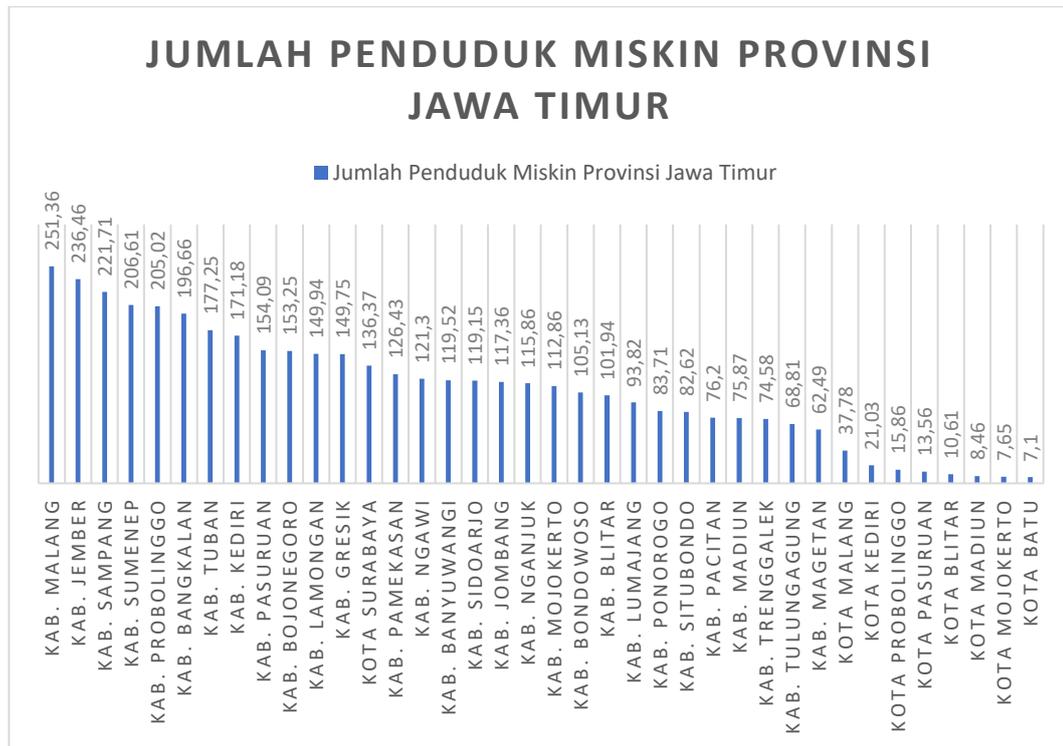
Menurut Nurhandayani (2019) menyebutkan bahwasannya kemiskinan yang terjadi di Indonesia mendapatkan pengaruh oleh sejumlah faktor, yakni tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang belum optimal serta modal dalam bentuk tabungan dan investasi yang masih relatif rendah. Karena belum meratanya distribusi pendapatan, yang merupakan satu di antara sumber masalah kemiskinan di Indonesia, disparitas antar daerah meningkatkan ketidaksamaan antara masyarakat miskin serta masyarakat kaya. Pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja, serta masalah lainnya, merupakan komponen penting dalam mengurangi kemiskinan di suatu wilayah. Oleh karena itu, pendekatan untuk mengatasi kemiskinan dapat dilakukan secara terpadu melalui berbagai sektor dan melibatkan berbagai pihak.

Kemiskinan bukan saja berdampak terhadap aspek ekonomi, akan tetapi juga meluas dalam dimensi sosial, kesehatan, politik dan pendidikan. Menurut Budhi, S., & Kembar (2013) mengatakan bahwa kemiskinan memiliki makna keterbatasan yang dialami oleh individu, kelompok, keluarga, ataupun negara yang menyebabkan ketidakmampuan dalam menjalani kehidupan, ancaman terhadap perlindungan hukum dalam menjamim keadilan, terganggunya proses transaksi dalam perdagangan, dalam jangka panjang hal tersebut menyebabkan kesulitan proses regenerasi pada suatu bangsa.

Sebagai otoritas utama negara, pemerintah berupaya mencegah kemiskinan dengan menerapkan program-program yang pro-masyarakat miskin, contohnya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Inisiatif ini mempunyai tujuan dalam menaikkan kesejahteraan penduduk serta mengatasi tantangan yang terkait dengan kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara maksimal karena dampaknya yang dapat menghambat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah berusaha menangani permasalahan ini melalui berbagai program, seperti Perlindungan dan Jaminan Sosial, termasuk bantuan sosial (Bansos) sembako serta Bansos PKH. PKH ialah program bansos berbentuk uang tunai yang diberikan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan persyaratan tertentu (Harahap, 2024). Program ini memiliki tujuan dalam meminimalisir kemiskinan serta menaikkan mutu hidup masyarakat. Pemerintah melaksanakan berbagai inisiatif, seperti bantuan modal atau uang bagi masyarakat miskin serta program transmigrasi, guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menurut Trisnu, C. G. S. P., & Sudiana (2019) menyatakan kemiskinan memengaruhi kualitas kesehatan, dan jika kondisi kesehatan masyarakat menurun, peluang mereka untuk mendapatkan pendidikan juga semakin terbatas. Hal ini berdampak pada menurunnya daya saing tenaga kerja, yang kemudian meningkatkan tingkat pengangguran dan pada akhirnya memperparah kondisi kemiskinan itu sendiri. BPS mengukur kemiskinan dengan mempergunakan konsep kemampuan *basic need approach* dimana kemiskinan dinilai sebagai ketidaksanggupan dari ranah ekonomi untuk melengkapi kebutuhan primer pangan serta bukan pangan yang dinilai dari segi pengeluaran.

**Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur Tahun 2023**



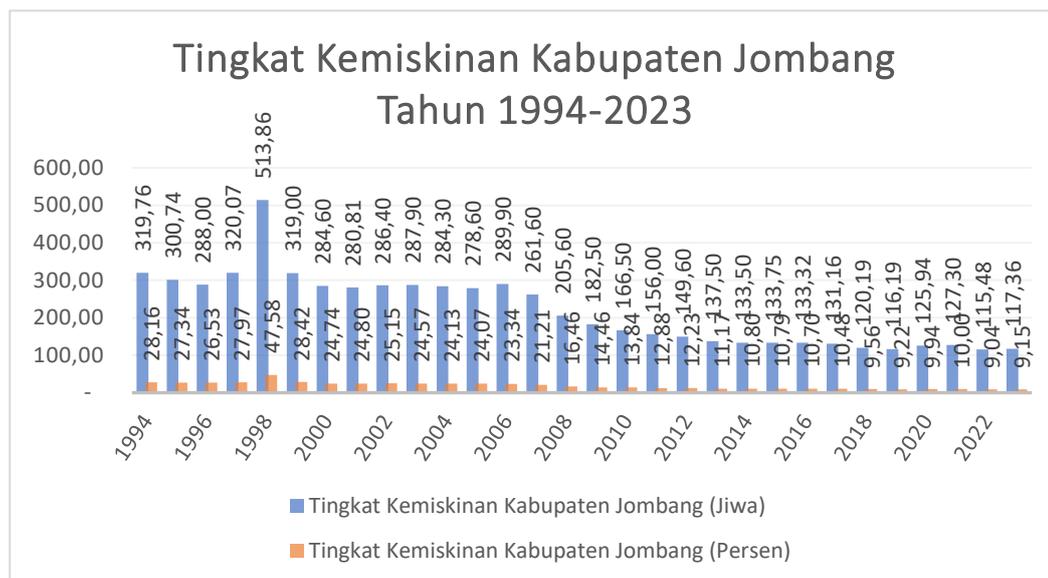
Sumber: BPS Jawa Timur Tahun 2023, diolah

Membahas mengenai kemiskinan, Kabupaten Jombang termasuk dalam golongan kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup besar. Menurut sumber dari berita radar Jombang angka kemiskinan meningkat sebesar 8,9 persen, jika dipersentasekan penduduk miskin di Jombang mengalami kenaikan dari 9,04 persen pada 2022 menjadi 9,15 persen pada Maret 2023,” ujar Statistik Muda BPS Jombang Reni Puspitasari. Dari pernyataan tersebut angka kemiskinan masih tergolong tinggi karena adanya peningkatan persentase penduduk miskin, hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kemiskinan di Kabupaten Jombang masih menjadi masalah. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya data *time series* dari BPS Kabupaten Jombang selama tahun 1994 hingga tahun 2023. Dengan jumlah penduduk sekitar 1,371 juta jiwa tersebut menjadikan Kabupaten Jombang

menempati peringkat 18 dari 38 Kota/Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak (BPS Kabupaten Jombang, 2023). Di tahun 2023, Kabupaten Jombang mencatat mempunyai 117,36 ribu jiwa penduduk miskin yang tersebar di 21 kecamatan, 301 desa dan 5 kelurahan. Hal tersebut artinya pemerintah pusat dan daerah harus berkolaborasi untuk dapat menciptakan Kabupaten yang terbebas dari permasalahan kemiskinan.

Kabupaten Jombang sebelumnya sudah memiliki RPJMD tahun 2018 – 2023 kemudian dengan Kepala Daerah terpilih sekarang Kabupaten Jombang memiliki rancangan baru RPJMD tahun 2025 – 2029 yang tercantum didalamnya yaitu mengenai strategi yang ditekankan untuk meningkatkan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak permasalahan sosial dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin, sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) (Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, 2024). Dan untuk mengkaji jumlah kemiskinan penelitian ini, penulis menentukan dengan menggunakan data time series yang terdapat di BPS Kabupaten Jombang.

**Gambar 1. 2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jombang**



Sumber: BPS Kabupaten Jombang, diolah

Tingkat kemiskinan bisa juga dianggap sebagai parameter penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi. Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Jombang. Tingkat kemiskinan di Kab. Jombang tahun 1994 sampai tahun 2021 selalu terjadi kenaikan dan penurunan jumlah penduduk miskin, kemudian pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,88 ribu jiwa, dari 115,48 ribu jiwa (9,04%) pada tahun 2022 menjadi 117,36 ribu jiwa (9,15%) pada tahun 2023. Dengan adanya data tersebut kemiskinan di Kabupaten Jombang masih menjadi masalah yang mendasar sehingga hal tersebut juga berdampak dalam berbagai faktor lainnya misalnya pertumbuhan ekonomi, rata-rata lama sekolah, serta tingkat pengangguran terbuka.

Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan problematika yang mendasar bagi tiap daerah utamanya pada Kabupaten Jombang. Dalam mengatasi masalah tersebut salah satu syarat penting dalam mencapai pembangunan ekonomi,

peningkatan kesejahteraan, dan pengurangan kemiskinan yaitu pertumbuhan ekonomi. Selain daripada itu, tolak ukur dari pertumbuhan ekonomi yaitu dengan terciptanya pembangunan yang mendorong represif tingkat kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan serta memenuhi kebutuhan hidup terutama dalam kegiatan perbaikan pembangunan modal manusia (*human capital*) perlu dilakukannya perbaikan SDM yang bisa dilakukan melalui pendidikan.

Rata-rata lama sekolah merupakan parameter yang menjumlahkan tahun rata-rata pendidikan yang telah ditempuh seseorang dalam mengikuti pendidikan formal, pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Semakin baik pendidikan akan mendorong peningkatan produktivitas dimana hal ini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Pendidikan memiliki fungsi sebagai sarana guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia supaya mampu melakukan implementasi teknologi modern sehingga dapat memajukan kuantitas produksi perekonomian. Pendidikan menambah wawasan seseorang serta memiliki manfaat guna mempelajari keterampilan yang diperlukan dalam dunia kerja. Peran penting pendidikan dalam masyarakat adalah untuk mengurangi kemiskinan dan memberikan kemampuan untuk berproses melalui wawasan serta keterampilan. Pendidikan dapat meningkatkan kualitas SDM, seorang yang menjadi pekerja kompeten dan mendapat pekerjaan yang baik hanya dihasilkan dari sumber daya manusia dengan kualitas unggul. Ilmu yang diperoleh dari pendidikan berfungsi sebagai wadah untuk mencari pekerjaan yang layak dan dapat menekan angka kemiskinan. Dengan tidak adanya pendidikan yang berkualitas, maka yang terjadi adalah menjadikan sumber daya manusia yang tidak berkompeten dimana hal tersebut dapat memicu terjadinya pengangguran.

**Gambar 1. 3 Jumlah Pengangguran di Kabupaten Jombang Tahun 2023**



Sumber: Disnaker Kabupaten Jombang Tahun 2023, diolah

Dengan adanya fenomena pengangguran akan memicu terjadinya kemiskinan dimana kemiskinan merupakan hal yang sangat genting dalam tiap daerah khususnya Kabupaten Jombang. Menurut sumber dari Radar Jombang angka pengangguran terbuka di Kabupaten Jombang masih tinggi dibuktikan dengan kesempatan kerja di Kabupaten Jombang termasuk masih rendah, sejumlah 35.334 masyarakat Jombang tercatat sebagai pengangguran hingga akhir 2023, dari jumlah itu sebanyak 9.552 pengangguran lulusan SD, 7.918 lulusan SMP, 9.084 lulusan SMK, 6.020 lulusan SMA, serta 2.790 lulusan universitas mayoritas pengangguran didominasi lulusan SD dan SMK. Fenomena pengangguran di Kabupaten Jombang semakin diperparah dengan adanya ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja serta ketersediaan lapangan pekerjaan. Menurut Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang (2024) mengatakan banyak lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang kesulitan mendapatkan pekerjaan yang

sesuai karena pencari kerja biasanya mencari kerja tidak mau jauh dari tempat tinggal dan keluarga, sehingga menghambat untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keinginannya. Selain itu, perubahan struktur ekonomi dan modernisasi di sektor pertanian menyebabkan berkurangnya kebutuhan tenaga kerja, yang pada akhirnya meningkatkan angka pengangguran.

Kabupaten Jombang, yang dikenal sebagai salah satu daerah dengan sektor pertanian dan industri yang berkembang, masih menghadapi permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang cukup signifikan. aktor utama yang menyebabkan kemiskinan di Kabupaten Jombang antara lain adalah rendahnya akses terhadap lapangan pekerjaan yang layak, terbatasnya keterampilan tenaga kerja, serta ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Merujuk pada data BPS Kabupaten Jombang, di tahun 2023, jumlah penduduk miskin menyentuh presentase 9,12%, sementara TPT menyentuh presentase 4,66%. Tingginya angka pengangguran juga menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan di daerah ini, mengingat banyaknya angkatan kerja yang belum terserap oleh sektor industri maupun pertanian (Badan Pusat Statistik, 2023).

Penelitian ini mengangkat permasalahan kemiskinan di Kabupaten Jombang karena kondisi tersebut menjadi hambatan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kabupaten Jombang memiliki peluang ekonomi yang relatif besar, baik di sektor pertanian, perdagangan, atau industri kecil & menengah. Namun, permasalahan pengangguran dan kemiskinan masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan melalui kebijakan yang tepat. Dengan memahami faktor-faktor penyebab kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Jombang, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberi wawasan yang semakin dalam terkait

kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta menawarkan solusi yang bisa diaplikasikan oleh pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mengatasi masalah ini. Maka dari itu, penelitian ini besar harapannya bisa memberi kontribusi untuk pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Jombang.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijabarkan tersebut, dengan demikian penulis mengambil judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Rata-rata Lama Sekolah, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Jombang”

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten Jombang?
2. Apakah rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten Jombang?
3. Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten Jombang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengidentifikasi pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten Jombang.

3. Untuk mengidentifikasi seberapa berpengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten Jombang.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Penulis mempergunakan jenis penelitian kuantitatif melalui metode Analisis Regresi Linier Berganda. Di penelitian ini mempergunakan data sekunder yang didapat dari BPS Kabupaten Jombang. Batasan masalah di penelitian ini mempunyai tujuan mengidentifikasi kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Jombang. Variabel yang terdapat di studi ini meliputi pertumbuhan ekonomi, rata-rata lama sekolah serta tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel independent serta tingkat kemiskinan ialah variabel dependent. Variabel tersebut digunakan sebagai alat ukur untuk meninjau tingkat persentase kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten Jombang dengan penerapan metode analisis linier berganda.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Melalui adanya penelitian ini diyakini mampu menghadirkan manfaat untuk khalayak umum. Terdapat sejumlah manfaat meliputi:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi penulis : penelitian ini bisa memperkaya wawasan serta ilmu terkait pengaruh pertumbuhan ekonomi, rata-rata lama sekolah serta tingkat pengangguran terbuka kepada tingkat kemiskinan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Pembaca : diharapkan penelitian ini bisa memberi manfaat untuk segala pihak yang ikut serta dalam permasalahan yang sedang diteliti. Selain

daripada itu, penelitian ini bisa dijadikan referensi yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka kepada tingkat kemiskinan.